SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BIMA

Oleh

Ahmad Yasin¹, Damhuji², Dati Amaliyah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Email :¹ahmadstih65@gmail.com, ²damhuji78@gmail.com,

³ddatiamaliyah@gmail.com

Article History:

Received: 07-11-2021

Revised:15-12-2021

Accepted: 23-12-2021

Keywords:

Rampant conflict, Bima
Regency, KKN, professional
Bazda

Abstract: *In overcoming the rampant conflicts that occurred in Bima Regency, of course, it is not enough to rely solely on legal instruments, but it is also necessary to examine the root of the problem thoroughly, including aspects of education, economy, politics, social and culture. With reference to the background of the problem above, the problem in this study is how to find the right solution to deal with social conflicts in Bima Regency with the aim of knowing the efforts or steps taken in resolving social conflicts in Bima Regency. This research is an empirical legal research, the approach used is a sociological perspective. The data source is field data, the method used is structured interview and observation, and the data analysis technique used is the deductive method. The solution to resolving conflicts or brawls between villages can be done in the following ways, such as building a synergistic and strong cooperative relationship between all parties, from the government, security forces, universities, media, private sector, and the community supported by sufficient budget to carry out these activities. mediation, dialogue, empowerment/training, and education for the younger generation, conducting raids and sweeping homemade weapons, arrows and sharp weapons, eradicating provocations and thuggery, stopping drug trafficking, gambling, and night entertainment, enforcing the law quickly and fairly, minimize the practice of KKN in government and society, and build a professional and fair system in distributing economic resources, such as building a professional Bazda.*

PENDAHULUAN

Selisih paham biasa terjadi dimana mana yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan konflik akan hak, hal inilah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bima

dan terkadang berujung pada perkelahian, tawuran antar kampung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada terhambatnya aktivitas keseharian masyarakat disekitar.

Mengenai konflik sosial di Indonesia, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermana Somantrie (2011), Provinsi NTB termasuk dari 14 Provinsi di Indonesia yang sering terjadi konflik sosial; sementara Kabupaten Bima merupakan daerah yang memiliki intensitas konflik sosial paling tinggi dari 10 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dalam satu dekade terakhir. Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bima, hampir merata di seluruh kecamatan dengan modus dan corak yang hampir sama dan juga berbeda antara satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dari tim Peneliti, bahwa maraknya konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di kabupaten Bima seringkali dipicu oleh masalah-masalah kecil atau yang bersifat personal di kalangan siswa, remaja, dan pemuda, seperti percecokan, perkelahian, dan pembacokan baik yang terjadi di sekolah maupun pada saat orgen tunggal di tengah masyarakat yang berkembang menjadi konflik antar kelompok atau konflik antar desa yang bersifat komunal. Konflik antara desa Risa dan Desa Dadibou akhir-akhir ini juga salah satu penyebabnya dipicu oleh perkelahian dua pelajar yang berasal dari dua desa tersebut yang berimbas menjadi konflik antar desa yang berkepanjangan.

Kita harus akui bahwa dampak konflik kekerasan di Kabupaten Bima mengakibatkan kerusakan fisik, krisis ekonomi, ketidakharmonisan, ketidakamanan, trauma, ketakutan dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Dampak negatif ini tentu akan menghambat proses pembangunan di segala bidang kehidupan di daerah dan mengakibatkan melambatnya perkembangan perekonomian serta tidak berjalannya roda pembangunan sebagaimana mestinya. Program pembangunan daerah Kabupaten Bima dalam bidang pariwisata misalnya tentu akan menghadapi kendala yang serius. Rencana pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam meningkatkan sumber APBD Kabupaten Bima hanya akan menjadi perencanaan yang sia-sia belaka kalau konflik sosial atau konflik kekerasan masih saja terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Bima. Artinya, bahwa pengembangan sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan kondisi keamanan dalam masyarakat atau sangat tergantung dengan rasa aman masyarakat. Jika kondisi Kabupaten Bima tidak aman maka wisatawan manca Negara dan domestik pun akan enggan berwisata di Kabupaten Bima.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima bersama kepolisian, TNI, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan para *stakeholders* lainnya belum mampu menghilangkan akar konflik yang sesekali melahirkan konflik susulan. Pendekatan persuasif dan represif pun tidak bisa menyelesaikan konflik hingga ke akar-akarnya. Setelah upaya dialog, mediasi, rekonsiliasi, dan represif dengan bantuan aparat polisi dan TNI tidak juga memberikan efek positif dan justru terkadang menambah panjang konflik yang terjadi.

Dalam mengatasi maraknya konflik yang terjadi di Kabupaten Bima tentu saja tidak cukup dengan mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan juga perlu dikaji akar permasalahannya secara menyeluruh, diantaranya aspek pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kita menyadari bahwa setiap konflik sosial tidak disebabkan oleh faktor tunggal melainkan disebabkan oleh beragam faktor. Berdasarkan itulah penelitian ini perlu

dilakukan agar dapat menemukan pokok masalahnya maupun model penyelesaiannya secara bertahap. Apabila tidak diatasi secara cepat, konflik ini mengganggu bahkan merusak proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima termasuk sektor pariwisata.

LANDASAN TEORI

Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut: Bagaimanakah solusi penyelesaian yang tepat guna menangani konflik sosial di Kabupaten Bima ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ingin mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, pendekatan yang digunakan adalah *Sociological Oproach*. Sumber data adalah data lapangan, metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi terstruktur, dan tehnik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Penyelesaian yang Tepat Dalam Menaangani Konflik Sosial Di Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden mengenai solusi dan model penyelesaian yang tepat dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut AN, bahwa ke depan untuk menyelesaikan konflik harus memaksimalkan peran semua pihak, terutama pemerintah, aparat hukum, akademisi, media, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan mendidik para siswa, remaja dan pemuda agar menjadi manusia yang berkarakter sesuai budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini mayoritas masyarakat Bima. Para siswa, remaja, dan pemuda harus dididik dan dikontrol agar dapat membaca Al Qur'an, menjalankan sholat wajib, memiliki pola hidup yang sehat, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam hal ini sistem pendidikan kita harus dibenahi, mulai dari leading sektor pendidikan yang harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dan professional, peningkatan kualitas guru, pemilihan kepala sekolah yang professional, perbaikan kurikulum muatan lokal, budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang nyaman. Sementara pada keluarga dan masyarakat harus juga mempraktekan kegiatan keagamaan, mengatur jam belajar masyarakat dan menerapkan pola hidup yang sehat terhadap para siswa, remaja, dan pemuda.

Relevan dengan itu, menurut SD, bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah desa perlu membuat kebijakan tentang "Program Desa Binaan", yaitu membangun hubungan kerjasama yang sinergis dan kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, media, akademisi, dan masyarakat yang diikuti oleh kebijakan penganggaran yang cukup dalam melakukan pemberdayaan, pendidikan, dan penanganan konflik pada

beberapa desa yang rawan konflik tersebut. Ketika ada konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi antara desa Risa dan Desa Dadibou atau antara Desa Ngali dan Desa Renda, mesti segera ditangani oleh semua unsur tersebut lengkap dengan program dan anggarannya yang cukup.

Menurut AH, bahwa dalam menyelesaikan konflik harus melakukan penegakkan hukum secara cepat dan adil terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dan meminimalisir praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam menangani kasus kriminalitas. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemerintah perlu juga melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran dalam proses politik, demokrasi, dan hukum. Kesadaran ini berimbas langsung pada kualitas kepemimpinan dan demokrasi. Dalam hal ini pemerintah perlu mengeluarkan anggaran dan bekerjasama dengan partai politik, media, KPU, Panwas, dan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara pada kesempatan lain, KSM mengatakan bahwa pemerintah harus menghentikan adanya hiburan malam/Orgen Tunggal, peredaran narkoba, dan meminimalisir tindak kejahatan di tengah masyarakat seperti perjudian, pencurian, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD, dan pemeritah desa membuat aturan sebagai payung hukumnya, seperti Peraturan Daerah dan atau Peraturan Desa. Semua pihak harus patuh, taat, dan tunduk terhadap peraturan yang ada. Aparat harus mengawal dan mendukung pemberlakuan peraturan tersebut. KSM juga mengatakan bahwa Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus melakukan rajia dan sweeping terhadap beredar bebasnya senjata rakitan, panah, dan senjata tajam setiap saat pada beberapa desa dan kecamatan yang rawan konflik atau yang tingkat kejahatannya tinggi. Pada tahap pertama, masyarakat diharapkan untuk menyerahkan secara suka rela senjata rakitan dan panah yang dimilikinya. Pada tahap berikutnya, jika masyarakat belum mau menyerahkan, maka pemerintah dan aparat keamanan dapat mengambil paksa dan menangkap pemiliknya untuk dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Ketika wawancara dengan AS warga desa Dadibou, menjelaskan bahwa Pemerintah, pihak swasta, dan perguruan tinggi mesti bekerjasama untuk membuka lapangan pekerjaan dan melakukan pemberdayaan terhadap pemuda dan kelompok usaha kecil menengah di desa melalui melalui pelatihan berwiraswasta, padat karya dan pemberian pinjaman modal usaha di berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti petani, nelayan, peternak, ekonomi kreatif, salon, rumah makan, dan lain-lain. Pemuda dan kelompok usaha kecil menengah ini diprioritaskan kepada warga masyarakat yang rawan konflik.

Menurut HD, bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Bima adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang perbedaan dan makna sebuah informasi. Perbedaan dapat dipahami, dimengerti dan ditoleran agar tidak saling curiga dan merugikan. Di Kabupaten Bima perlu menciptakan ruang mediasi, komunikasi lintas kelompok dengan semangat membaur dan terintegrasi. Masyarakat kita kadangkala menikmati ruang-ruang mereka tersekat-sekat perbedaan, tanpa dihubungkan arena dalam berkomunikasi. Keterbatasan media komunikasi menyebabkan munculnya potensi manipulasi informasi dan persepsi. Wajar saja jika perbedaan kemudian terdistorsi, lalu lahirlah kecurigaan dan tidak saling percaya

antar sesama. Persepsi yang saling berlawanan tidak dikomunikasikan, akibatnya saling bermusuhan. Hal ini berkembang oleh konstruksi dan stereotip kelompok atau kampung, mengidentikkan perilaku seseorang dengan latar belakang kepentingan dan kebutuhan. Sehingga kemudian muncul stigma kolektif.

Lebih lanjut HD menjelaskan, bahwa perlu memperluas dan mengembangkan tradisi dialog, menghilangkan cara kekerasan sampai pada level unit sosial yang paling kecil yaitu unit keluarga. Mengelola hubungan sosial hendaknya mengedepankan prinsip dialogis, fasilitasi, partisipasi warga menjadi sangat relevan, terutama dikaitkan konteks struktur dan kultur masyarakat yang sudah berubah ke arah lebih maju saat ini. Menempatkan setiap individu dan komunitas (yang diinisiasi) baik dalam kelompok maupun kampung dari semua level sebagai agen yang terus mengkampanyekan perdamaian dengan pendekatan social, seni, dan kebudayaan.

Pembahasan

Berbicara tentang konflik di Indonesia, menurut Amien Tohari (2011: 3), bahwa konflik yang paling dominan selama satu sampai dua dekade terakhir adalah konflik kekerasan rutin yang berupa tawuran, penghakiman massa, dan pengeroyokan. Sementara konflik politik, konflik agama, konflik etnik, konflik sumber daya ekonomi, dan konflik yang lainnya tidak begitu begitu dominan atau hanya sebagian kecil saja persentasenya. Kalau kita cermati secara mendalam tentang konflik di Kabupaten Bima, dapat dikatakan sebagai konflik kekerasan rutin tersebut. Hal ini relevan dengan penjelasan Mulyana Permana (2016) ketika melakukan penelitian di Kabupaten Bima, bahwa konflik di Kabupaten Bima dikatakan sebagai konflik tawuran antar kampung atau konflik komunal antar desa. Kami mengamati bahwa masing-masing desa memiliki sentimen identitas dan solidaritas kampung atau desa yang sangat kuat melebihi sentimen dalam hal apapun.

Ketika terjadi percekocokan atau perkelahian dengan anggota kampung lain, identitas kampung dikordinir menjadi solidaritas melawan identitas kampung lain tersebut. Identitas kampung dikonstruksi dari perbedaan walaupun perbedaannya sangat kecil. Bahkan, perbedaan itu selalu dicari dan dikonstruksi menjadi identitas berbeda dengan kampung lainnya. Identitas itu disebut sebagai *constructed identity* yaitu identitas konstruktif yang menjadi sentimen identitas sebagaimana tesis (Tania Murray Li, 2000), yang mengatakan bahwa identitas-identitas itu sesungguhnya dikonstruksikan melalui perbedaan dan lahir dari relasi individu dengan 'the other'. Sentimen identitas terbentuk dari kesadaran atas perbedaan yang nyata dengan the other. Akhirnya, menjunjung tinggi dan membela nama kampung adalah sebuah keniscayaan, bahkan rela mati demi superioritas identitas kampung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik kekerasan rutin (tawuran antar kampung atau konflik komunal antar desa) di Kabupaten Bima, antara lain:

Pertama, disebabkan oleh faktor kenakalandaan perkelahian antar siswa, remaja, dan pemuda secara personal yang berimbas pada konflik antar kelompok, antar lingkaran kekerabatan, dan akhirnya menjadi konflik yang lebih luas secara komunal antar desa. Kenakalandaan dan perkelahian ini juga karena berawal dari faktor mental, moral, dan agama generasi muda yang sudah rusak atau sakit. Generasi muda tercerabut dari nilai-nilai budaya Bima dan agama dalam kehidupannya sehari-hari. Falsafah hidup orang Bima tentang Maja Labo Dahu dan Nggusu Waru tidak lagi ditanamkan dan tidak diindahkan oleh

sebagian besar generasi muda. Begitu juga dengan pendidikan dan pengamalan agama Islam di sekolah, keluarga dan masyarakat sudah sangat merosot.

Kedua, konflik sosial yang terjadi, disebabkan oleh faktor perilaku 'premanisme', 'sok jagoan', dan 'proyek pengangguran' yang dilakukan oleh sebagian kecil pemuda desa. Para pemuda yang preman, sok jagoan dan pengangguran ini sengaja membuat gara-gara dan keributan dengan pemuda desa lain agar terjadi konflik komunal atau konflik antar desa. Bagi para pemuda ini, konflik antar desa menjadi proyek atau kesempatan untuk meraup keuntungan secara materi dan secara sosial. Keuntungan materi yang didapat adalah dengan meminta atau mengumpulkan dari warga desa sebagai aksi solidaritas dalam menjaga keamanan desa dalam jumlah yang tidak sedikit untuk digunakan selama konflik berlangsung. Sementara keuntungan sosialnya adalah dapat meningkatkan solidaritas, kepedulian, dan membuat hubungan sesama warga semakin membaik dan dekat satu sama lain. Dalam momen dan kondisi seperti ini, muncul figur yang akan menjadi 'tokoh' pemuda yang dikenal secara luas oleh seluruh warga desa.

Ketiga, disebabkan oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebenaran informasi yang beredar. Antara fakta dan isu tidak dapat dibedakan oleh sebagian dari warga masyarakat desa, Apapun informasi yang beredar sangat cepat dan mudah dipercaya oleh masyarakat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum dan kelompok tertentu untuk melanggengkan konflik agar terjadi terus menerus. Para elit politik lokal kadang memanfaatkannya untuk kepentingan politiknya. Begitu juga dengan para pemuda, memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi dan untuk mengusik kenyamanan masyarakat tertentu. Di sini ada sebenarnya dipicu oleh faktor kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Keempat, disebabkan oleh faktor maraknya penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, pencurian, dan lain-lain. Faktor lainnya adalah dipicu oleh beredar bebasnya atau kepemilikan Senjata Rakitan, Panah, Senjata Tajam, dan adanya hiburan malam atau orgen tunggal di desa. Keadaan inilah sesungguhnya menjadi pemicu awal adanya perkelahian, pembacokan, pengeroyokan, dan bahkan pembunuhan, lalu ditambah lagi dengan lemah dan lambannya penegakkan hukum, ketidakadilan sosial, dan minimnya lapangan pekerjaan.

Dengan melihat begitu kompleksnya faktor penyebab terjadinya konflik atau tawuran antar kampung ini, maka berdasarkan data dari berbagai sumber dan hasil wawancara dari beberapa responden, ada beberapa solusi penyelesaian konflik yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

- (a) Memaksimalkan peran semua pihak, terutama pemerintah, aparat hukum, akademisi, media, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan mendidik para siswa, remaja dan pemuda agar menjadi manusia yang berkarakter sesuai budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini mayoritas masyarakat Bima. Para siswa, remaja, dan pemuda harus dididik dan dikontrol agar dapat membaca Al Qur'an, menjalankan sholat wajib, memiliki pola hidup yang sehat, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam hal ini sistem pendidikan kita harus dibenahi, mulai dari leading sektor pendidikan yang harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dan profesional, peningkatan kualitas guru, pemilihan kepala sekolah yang profesional, perbaikan kurikulum muatan lokal, budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang nyaman.

Sementara pada keluarga dan masyarakat harus juga mempraktekan kegiatan keagamaan, mengatur jam belajar masyarakat dan menerapkan pola hidup yang sehat terhadap para siswa, remaja, dan pemuda.

- (b) Pemerintah daerah bersama pemerintah desa perlu membuat kebijakan tentang “Program Desa Binaan”, yaitu membangun hubungan kerjasama yang sinergis dan kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, media, akademisi, dan masyarakat yang diikuti oleh kebijakan penganggaran yang cukup dalam melalukan pemberdayaan, pendidikan, dan penanganan konflik pada beberapa desa yang rawan konflik tersebut. Ketika ada konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi antara desa Risa dan Desa Dadibou atau antara Desa Ngali dan Desa Renda, mesti segera ditangani oleh semua unsur tersebut lengkap dengan program dan anggarannya yang cukup.
- (c) Melakukan penegakkan hukum secara cepat dan adil terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dan meminimalisir praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam menangani kasus kriminalitas. Pemerintah perlu juga melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran dalam proses politik, demokrasi, dan hukum. Kesadaran ini berimbas langsung pada kualitas kepemimpinan dan demokrasi. Dalam hal ini pemerintah perlu mengeluarkan anggaran dan bekerjasama dengan partai politik, media, KPU, Panwas, dan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.
- (d) Pemerintah dan dibantu oleh semua pihak, bahwa harus menghentikan adanya hiburan malam/Orgen Tunggal, peredaran narkoba, dan meminimalisir tindak kejahatan di tengah masyarakat seperti perjudian, pencurian, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD, dan pemeritah desa membuat aturan sebagai payung hukumnya, seperti Peraturan Daerah dan atau Peraturan Desa. Semua pihak harus patuh, taat, dan tunduk terhadap peraturan yang ada. Aparat harus mengawal dan mendukung pemberlakuan peraturan tersebut. Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus melalukan rajia dan sweeping terhadap beredar bebasnya senjata rakitan, panah, dan senjata tajam setiap saat pada beberapa desa dan kecamatan yang rawan konflik atau yang tingkat kejahatannya tinggi. Pada tahap pertama, masyarakat diharapkan untuk menyerahkan secara suka rela senjata rakitan dan panah yang dimilikinya. Pada tahap berikutnya, jika masyarakat belum mau menyerahkan, maka pemerintah dan aparat keamanan dapat mengambil paksa dan menangkap pemiliknya untuk dihukum sesuai aturan yang berlaku.
- (e) Pemerintah, pihak swasta, dan perguruan tinggi mesti bekerjasama untuk membuka lapangan pekerjaan dan melakukan pemberdayaan terhadap pemuda dan kelompok usaha kecil menengah di desa melalui melalui pelatihan berwiraswasta, padat karya dan pemberian pinjaman modal usaha di berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti petani, nelayan, peternak, ekonomi kreatif, salon, rumah makan, dan lain-lain. Pemuda dan kelompok usaha kecil menengah ini diprioritaskan kepada warga masyarakat yang rawan konflik.
- (f) Masyarakat Perlu diberi pemahaman tentang makna sebuah informasi dan kesadaran tentang makna sebuah perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal

ini dilakukan agar informasi yang beredar tidak mudah dipercaya dan agar warga masyarakat tidak saling curiga satu sama lain. Di masyarakat perlu menciptakan ruang mediasi, komunikasi lintas kelompok dengan semangat membaaur dan terintegrasi. Agar semakin efektif beredarnya informasi maka perlu membangun tradisi dialog di tengah masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Di setiap desa juga perlu ada gerakan atau kampanye yang rutin mengenai perdamaian dan hidup harmonis. Tetapi semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada keteladanan dari pemimpin dan kalau masih terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi.

Kalau Konflik atau tawuran antar kampung ini tidak ditangani dengan beragam solusi tersebut maka akan memiliki dampak yang jauh lebih besar di waktu yang akan datang. Dampak konflik yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah dan masyarakat adalah:

Pertama, dapat merugikan masyarakat secara luas, mulai dari kekerasan fisik, ketakutan atau trauma secara psikis, dan dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Ketika tawuran berlangsung, warga masyarakat takut untuk menggarap sawahnya dan tidak bebas melakukan aktivitas seperti biasanya.

Kedua, konflik sosial seringkali mengganggu jalur transportasi masyarakat dengan aksi pemblokiran jalan-jalan utama sehingga mengganggu dan menghambat masyarakat lokal, turis domestik, dan turis mancanegara yang mau mengunjungi tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Kondisi seperti ini tentu sangat mengganggu dan menghambat rencana pemerintah daerah Kabupaten Bima untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

KESIMPULAN

Solusi penyelesaian konflik atau tawuran antar kampung ini, dapat dilakukan beberapa hal berikut, seperti membangun hubungan kerjasama yang sinergis dan kuat antara semua pihak mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perguruan tinggi, media, swasta, dan masyarakat yang didukung oleh anggaran yang cukup untuk melakukan mediasi, dialog, pemberdayaan/pelatihan, dan pendidikan terhadap generasi muda, melakukan rajia dan sweeping senjata rakitan, panah, dan senjata tajam, memberantas aksi provokasi dan premanisme, menghentikan peredaran narkoba, perjudian, dan hiburan malam, menegakkan hukum dengan cepat dan adil, meminimalisir praktek KKN dalam pemerintahan dan masyarakat, dan membangun sistem yang professional dan adil dalam mendistribusi sumber daya ekonomi, seperti membangun Bazda yang professional.

SARAN

Saran yang dapat kami disampaikan adalah agar konflik atau tawuran antar kampung ini dapat ditangani dengan baik, dan mengharapakan kepada semua pihak terutama generasi muda, masyarakat, pemerintah, aparat hukum, perguruan tinggi, sekolah, dan media untuk serius berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Kabupaten Bima. Ke depan diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk menangani konflik yang terjadi di Kabupaten Bima lengkap dengan rancangan programnya. Anggaran tersebut digunakan untuk Program Desa Binaan,

pelatihan, pemberdayaan, pendidikan, dan modal usaha masyarakat.

Kepada semua pihak yang berkompeten dan berwenang langsung dalam penyelesaian konflik sosial ini, diharapkan agar dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena niat yang tulus ikhlas kepada Allah SWT. Semoga amal baiknya mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anthony Giggens,*Metode Sosiologi Kaidah-kaidah Baru. Buku Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [2] Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- [3] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.
- [4] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345. 2
- [5] Georgre Ritzer,*Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [6] Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hal.98
- [7] Gunawan Wiradi, 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [8] Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67
- [9] Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.22.
- [10] Simon Fisher, 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta.
- [11] Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- [12] Sugiyono, 2011. *Penelitian Kualitatif, kuantitatif, R & D*. Alfabeta. Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN